

 GRAHA ILMU

EDITOR:

Lindrianasari
Susi Sarumpaet

AKUNTANSI

**Sebuah Kajian Terhadap Kebijakan
Perusahaan dan Pemerintah**



AKUNTANSI

**Sebuah Kajian Terhadap Kebijakan
Perusahaan dan Pemerintah**

EDITOR:

Lindrianasari
Susi Sarumpaet



GRAHA ILMU

AKUNTANSI; Sebuah Kajian Terhadap Kebijakan Perusahaan dan Pemerintah

oleh Ganjar Asdi Sudrajat; Ratna Septiyanti; Yuztitya Asmaranti; Muhammad Sidiq;
Lindrianasari; Marselina; Meryza Purnama; Rindu Rika Gamayuni; Yuna Amelia; M. Elly
Candrawati; Susi Sarumpaet; Fitra Dharma; Hafin Jaya Wardana; Niken Kusumawardani;
Einde Evana; Wuri Astuti Hanafi; Dewi Sukmasari; Sudrajat.

Editor: Lindrianasari; Susi Sarumpaet

Hak Cipta © 2019 pada penulis

Edisi Pertama: Cetakan I ~ 2019



Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283
Telp: 0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057;

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-228-067-0

Buku ini tersedia sumber elektronisnya

DATA BUKU:

Format: 17 x 24 cm; Jml. Hal: xiv + 146; Kertas Isi: HVS 70 gram; Tinta Isi: BW/Colour;
Kertas Cover: Iвори 260 gram; Tinta Cover: Colour; Finishing: Perfect Binding; Laminasi Doff.



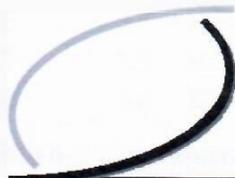
Kata Pengantar

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, adalah salah satu jurusan yang sangat diminati saat ini, khususnya untuk Program Studi S1 dan S2. Konsistensi dalam menghasilkan karya ilmiah sebagai hasil penelitian empiris di bidang akuntansi adalah salah satu bukti kemapanan Lembaga ini dalam mengemban tugas tridarma perguruan tinggi. Selain tenaga pengajar, salah satu bukti pencapaian Mahasiswa sarjana dan pascasarjana adalah menulis penelitian ilmiah untuk tugas akhir mereka dalam menyelesaikan pendidikan yang ditempuh. Penulisan tugas akhir itu dilakukan di bawah pengawasan dosen dan profesor yang ahli dalam bidang yang diteliti.

Tujuan dari monograp ini adalah untuk mempublikasikan beberapa makalah terbaik yang ditulis oleh para siswa sekaligus memberikan contoh laporan penelitian yang dilakukan mahasiswa sarjana dan pascasarjana dalam disiplin akuntansi, kepada pembaca Berbagai topik disajikan, mulai dari masalah lingkungan hingga kinerja yang merugikan, dan dari penipuan hingga masalah budaya di lembaga pemerintah. Di sisi lain, beberapa penelitian juga dilakukan dengan membandingkan data Indonesia dan negara tetangga.

Semoga Monograp ini memberikan nilai tambah bagi Jurusan Akuntansi dan Universitas Lampung, menjadi bukti keberhasilan penulisan karya ilmiah yang dinamis dan siap dikritisi dalam kancah pemikiran ilmiah yang kondusif. Terima kasih.

Editor



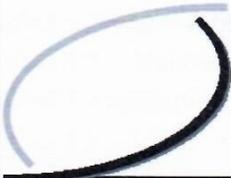
DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Bab 1 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja oleh: Ganjar Asdi Sudrajat, Ratna Septiyanti, Yuztitya Asmaranti	1
1.1 Pendahuluan	2
1.2 Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis	4
1.3 Metode Penelitian	10
1.4 Hasil dan Pembahasan	13
1.5 Simpulan dan Saran	19
1.6 Daftar Pustaka	20
Bab 2 Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia oleh: Muhammad Sidiq, Lindrianasari, Fitra Darma, Marselina	25
2.1 Pendahuluan	26
2.2 Landasan Teori	30
2.3 Metode Penelitian	33
2.4 Hasil Penelitian	39
2.5 Pengujian Hipotesis	48

2.6	Pembahasan	53
2.7	Kesimpulan dan Saran	55
2.8	Daftar Pustaka	57
Bab 3	Pengaruh Opini Audit, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap <i>Audit Delay</i> oleh: Meryza Purnama, Rindu Rika Gamayuni, Yunia Amelia	61
3.1	Pendahuluan	61
3.2	Tinjauan Pustaka	65
3.3	Pengembangan Hipotesis	68
3.4	Metode Penelitian	70
3.5	Hasil dan Pembahasan	71
3.6	Simpulan dan Saran	80
3.7	Daftar Pustaka	82
Bab 4	Pengaruh Penerapan Sistem Insentif dan <i>Organizational Citizenship Behaviour</i> terhadap Kinerja Tenaga Pendidik Universitas Lampung Oleh: M. Elly Candrawati, Susi Sarumpaet, Yunia Amelia, Fitra Dharma	85
4.1	Pendahuluan	86
4.2	Tinjauan Pustaka	87
4.3	Metode Penelitian	90
4.4	Hasil dan Pembahasan	91
4.5	Kesimpulan dan Saran	97
4.6	Daftar Pustaka	98
Bab 5	Pengakuan, Pengukuran Biaya Lingkungan dan Pengungkapan Lingkungan pada Kualitas Lingkungan Oleh: Hafin Jaya Wardana, Lindrianasari, Niken Kusumawardani, Einde Evana	103
5.1	Pendahuluan	104
5.2	Tinjauan Pustaka	106
5.3	Metode Penelitian	109

<i>Daftar Isi</i>		<i>ix</i>
5.4	Hasil Penelitian dan Pembahasan	112
5.5	Kesimpulan dan Saran	117
5.6	Daftar Pustaka	119
Bab 6	Analisis Perbedaan Nilai Aset Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Oleh: Wuri Astuti Hanafi, Rindu Rika Gamayuni, Dewi Sukmasari, Sudrajat	123
6.1	Pendahuluan	124
6.2	Tinjauan Pustaka	125
6.3	Metode Penelitian	131
6.4	Hasil Penelitian dan Pembahasan	132
6.5	Simpulan dan Saran	135
6.6	Daftar Pustaka	136
TENTANG PENULIS		141

-oo0oo-



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Skala Rasio Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	11
Tabel 1.2	Ringkasan Variabel Penelitian	12
Tabel 1.3	Proses Pengambilan Sampel	14
Tabel 1.4	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	14
Tabel 1.5	Hasil Uji Regresi	16
Tabel 2.1	Trend Komposisi Pendapatan Daerah T.A 2010 - 2014 (Dalam milyar Rupiah)	27
Tabel 2.2	Kriteria Indeks Kemampuan Keuangan Daerah	36
Tabel 2.3	Deskriptif Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia Periode 2010 s.d 2014	40
Tabel 2.4	Deskriptif PAD Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2010 s.d 2014	40
Tabel 2.5	Deskriptif DAU Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2010 s.d 2014	41
Tabel 2.6	Deskriptif Peran (<i>Share</i>) dan <i>Growth</i> Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2010 s.d 2014	41
Tabel 2.7	Trend Rata-rata Kontribusi PAD terhadap APBD pada Kabupaten/Kota di Indonesia dengan IKK Tinggi	43
Tabel 2.8	Trend Rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD pada Kabupaten/Kota di Indonesia dengan IKK Sedang	43

Tabel 2.9	Trend Rata-rata Kontribusi PAD terhadap APBD pada Kabupaten/Kota di Indonesia dengan IKK Rendah	44
Tabel 2.10	Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Kabupaten/Kota Indonesia Periode 2010 s.d 2014	44
Tabel 2.11	Hasil Chi-Squared Hasil Uji Chow	45
Tabel 2.12	Hasil Chi-Squared Hasil Uji Hauman	46
Tabel 2.13	Perbandingan Model <i>Fixed Effect</i> (FE)	47
Tabel 2.14	Hasil Regresi DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Indonesia dengan IKK Tinggi	48
Tabel 2.15	Hasil Regresi DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/ Kota di Indonesia dengan IKK Sedang	50
Tabel 2.16	Hasil Regresi DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Indonesia dengan IKK Rendah	51
Tabel 2.17	Hasil Regresi DAU dan PAD terhadap BD Tanpa Belanja Pegawai	52
Tabel 2.18	Jumlah Daerah Berdasarkan Kategori IKK	53
Tabel 2.19	Hasil Analisis Regresi dan Uji Hipotesis	54
Tabel 3.1	Statistik Deskriptif	72
Tabel 3.2	Nilai Statistik <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>	74
Tabel 3.3	Nilai $-2 \text{ Log Likelihood (Block Number = 0) Iteration History}$,b,c	74
Tabel 3.5	Nilai <i>Nagelkerke R Square</i>	75
Tabel 3.6	Hasil Uji Regresi Logistik	76
Tabel 4.1	Perhitungan Proporsi Sampel Tenaga Pendidik Setiap Fakultas yang ada di Universitas Lampung	91
Tabel 4.2	<i>Descriptive Statistics</i>	92
Tabel 4.3	Pengujian Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	94
Tabel 4.4	Uji Reliabilitas	94
Tabel 4.5	Nilai <i>Coefficient of Determinant (R2)</i>	94
Tabel 4.6	<i>Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values, P-Values)</i>	95
Tabel 5.1	Sampel Penelitian	112

Tabel 5.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif	113
Tabel 5.3	Uji Kelayakan Model Hosmer and Lemeshow Test	114
Tabel 5.4	Uji Kesesuaian Keseluruhan Model	114
Tabel 5.5	Uji Koefisien Determinasi	114
Tabel 5.6	Hasil Uji Hipotesis	115
Tabel 6.1	Proses Pengambilan Sampel Penelitian	132
Tabel 6.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif Aset Lancar Sebelum dan Sesudah Penerapan SAP Berbasis AkruaI (Dalam Milyaran Rupiah)	133
Tabel 6.3	Hasil Uji Statistik Deskriptif Aset Lainnya Sebelum dan Sesudah Penerapan SAP Berbasis AkruaI (Dalam Jutaan Rupiah)	133
Tabel 6.4	Hasil Uji Beda Wilcoxon Sebelum dan Sesudah Penerapan SAP Berbasis AkruaI	134

-oo0oo-

Bab 2

Analisis *Flypaper Effect* Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia

¹Muhammad Sidiq¹, ²Lindrianasari, ³Fitra Darma, ⁴Marselina
¹Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah ^{2,3,4} Department of Accounting,
University of Lampung ¹email: sidiqmuhammad82@gmail.com

ABSTRACT

Fiscal decentralization is one of the implementation of autonomy policies that provides opportunities for regions to manage and develop their own regional potential to the fullest. This policy has an impact on the need for substantial funds as a pillar towards the independence of local governments. The source of funds in question comes from Regional Original Income (PAD), Central Government Transfers and other legitimate income. One of the central government transfer funds is the General Allocation Fund (DAU) which is an unconditional grant.

This study aims to assess which sources of funding sources (PAD and DAU) are more influential on regional expenditure (whether or not there is an effect flypaper) as measured by the Financial Ability Index (IKK). IKK is measured using the 2003 Bappenas model, and to view flypaper effects using a panel data multiple regression model. The samples analyzed were 2,405 (districts/cities throughout Indonesia) in the period 2010- 2014.

The results of the research are obtained, the districts/cities that have high IKK are 153; districts/cities that have moderate IKK are 151; and districts/cities that have a low IKK are 147. The regression test results show that DAU and PAD have a significant positive effect on regional expenditure. The effect of DAU is

greater than PAD in regions with high, medium and low IKK. These findings indicate that flypaper effect occurs in all districts/cities in Indonesia.

Keywords: flypaper effect, Financial Ability Index, Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU).

2.1 Pendahuluan

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tentang Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya, kebijakan tersebut diatur dalam UU No. 23/2014, dan UU 33/2004. Kemudian pengaplikasian dijelaskan melalui beberapa Peraturan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21/2011 menyiratkan bahwa untuk tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelola daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah, yang meliputi Neraca Daerah, Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, dan Laporan Aliran Kas. Dari Laporan APBD tersebut dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun fiskal.

Salah satu yang dapat diamati adalah sumber pendanaan APBD di mana tersebut mencakup dana transfer atau dana perimbangan dari Pemerintah Pusat seperti yang tercantum dalam UU No. 33/2004. Di samping dana perimbangan tersebut dalam APBD, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah, kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah, dan merupakan kebijakan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Namun terdapat suatu pertanyaan mengapa daerah terlalu bergantung transfer untuk membiayai belanja daerah tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Di saat transfer yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode

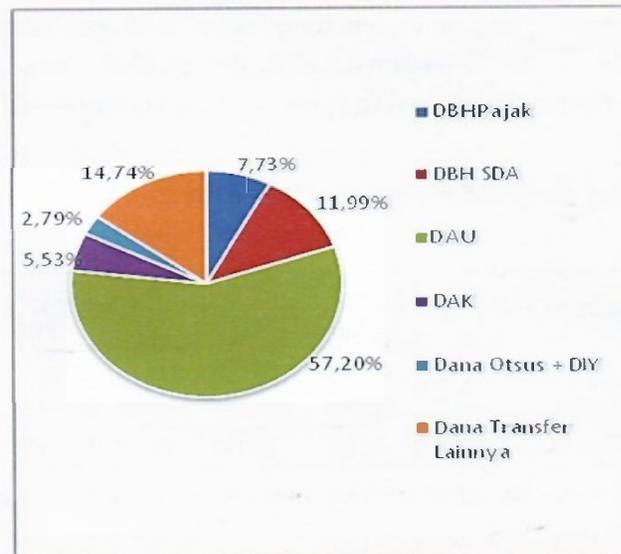
berikutnya transfer yang diperoleh tetap besar, sehingga besaran transfer meningkat di tahun berikutnya. Hal ini terlihat dari *trend* dana perimbangan secara nasional yang masih dominan setiap tahunnya, seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 *Trend Komposisi Pendapatan Daerah T.A 2010 - 2014 (Dalam milyar Rupiah)*

Pendapatan Daerah	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
PAD	71.852	90.393	112.745	140.328	180.397
Dana Perimbangan	292.281	327.368	380.984	433.213	482.221
Lain-Lain Penapatan yang sah	22.205	42.132	58.218	79.971	96.908

Sumber: Data APBD Konsolidasi 2010-2014 pada deskripsi Analisis APBD Depkeu 2014.

Tabel 2.1 menunjukkan dana perimbangan tahun 2011 meningkat 12%, tahun 2012 meningkat 16,38%, tahun 2013 meningkat 11,32% dan tahun 2014 meningkat sebesar 13,35%, dan porsi terbesar dana perimbangan tahun 2014 dalam APBN adalah DAU yang ditunjukkan pada Gambar 21 menunjukkan DAU masih menjadi kontributor terbesar dana perimbangan dengan persentase 57,20% dari APBN tahun 2014. DAU merupakan transfer tidak bersyarat (*unconditional grant*) dianggap lebih *flexibel* dalam penggunaannya, harapannya agar dapat dialokasikan pada sektor-sektor produktif sehingga mampu mendorong peningkatan investasi di daerah dan meningkatkan respon pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan yang disediakan seperti tujuan dari desentralisasi itu sendiri, yang kemudian memunculkan efek dalam peningkatan kontribusi publik terhadap PAD seperti dalam bentuk pajak yang juga meningkatnya kapasitas fiskal daerah, sehingga tanggungan pemerintah untuk memberikan DAU bisa lebih dikurangi. Dengan arti lain pemberian DAU seharusnya menjadi pendorong peningkatan kemandirian daerah.



Sumber: DJPK yang disampaikan pada seminar ISEI FEB Unila 2015.

Gambar 2.1 Grafik Komposisi Dana Transfer ke Daerah dalam APBN

Data di atas mengindikasikan terdapat perilaku *asimetris* pemerintah daerah terhadap sumber dana dalam APBD. Perilaku pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang dimilikinya, baik dari transfer pusat maupun dari PAD merupakan objek yang telah diteliti dan dijelaskan oleh beberapa peneliti dengan berbagai pendekatan. (Gamkhar dan Oates, 1996) dalam Abdullah dan Halim (2003) mengatakan bahwa pemerintah daerah bisa merespon transfer dari pusat secara simetris dan tidak simetris. Menurut Alderete (2004) ketika pemerintah pusat memberikan bantuan melalui transfer kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja daerah, terdapat spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer tersebut secara *asimetris*. Kuncoro (2007) menemukan bahwa perubahan besaran transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota dan kabupaten menimbulkan perilaku *asimetris* pemerintah kota dan kabupaten dalam penggunaan dana transfer yang diterimanya. Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa peningkatan

alokasi transfer dari pemerintah pusat akan direspon oleh pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan belanja daerah yang lebih tinggi.

Hubungan pengaruh dari transfer dana antar pemerintah dan pendapatan daerah terhadap kebijakan belanja daerah dalam dunia akademis dikenal sebagai *Flypaper Effect*. Beberapa peneliti menjelaskan respon belanja pemerintah daerah sebagai *Flypaper Effect*, yaitu respon belanja pemerintah daerah yang berbeda untuk sumber dana dari transfer pemerintah pusat dan pendapatan sendiri/PAD. Dengan kata lain, ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah/ PAD. Ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer dibandingkan pendapatan daerah, maka kondisi tersebut disebut *Flypaper Effect* (Oates, 1999) dalam Abdullah dan Halim (2003).

Abdullah dan Halim (2003) mengatakan bahwa secara terpisah, DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah, baik dengan maupun tanpa *lag*. Ketika tidak digunakan tanpa *lag*, pengaruh PAD terhadap Belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan *lag*, pengaruh DAU terhadap Belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD. Hal ini berarti terjadi *flypaper effect* dalam respon Pemda terhadap DAU dan PAD. Ketika kedua faktor (DAU dan PAD) diregres serentak dengan Belanja daerah, pengaruh keduanya juga signifikan, baik dengan ataupun tanpa *lag*. Dalam model prediksi tanpa *lag*, daya prediksi DAU lebih rendah dari PAD, tetapi sebaliknya dalam prediksi dengan *lag*. Dengan demikian, terjadi *flypaper effect* di kabupaten/kota Jawa dan Bali. Namun menurut beliau hasil tersebut tidak dapat disamakan untuk seluruh wilayah di seluruh Indonesia, karena Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di luar Jawa-Bali.

Kurnia dan Ananda (2013) mengatakan setiap daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda, pertumbuhan ekonomi seharusnya memicu timbulnya PAD seperti melalui pajak dan retribusi, dan PAD tersebut yang seharusnya berjalan mengimbangi transfer pusat. Apabila siklus ini berjalan dengan baik maka seharusnya kapasitas dan kebutuhan

fiskal daerah dapat berjalan dengan seimbang. Berdasarkan hal tersebut Kurnia dan Ananda (2013) melakukan penelitian tentang *flypaper effect* yang berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur, hasil penelitian menunjukkan Daerah yang memiliki IKK yang tinggi tidak terjadi *flypaper effect* sedangkan daerah yang kondisi IKK rendah terjadi *Flypaper Effect*.

Kajian tentang Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) itu sendiri telah diteliti oleh Bappenas (2003) dengan mengamati Indeks *Growth* PAD, Indeks *Share* PAD (rasio antara PAD dan Belanja Daerah) dan Indeks *Elastisitas* (rasio pertumbuhan PAD dan pertumbuhan PDRB), yang mana ketiga hal tersebut mencerminkan kapasitas dan upaya daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya sendiri.

2.2 Landasan Teori

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori *prinsipal-agen* menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) agar agen akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dengan kontrak tersebut, masalah yang sering terjadi dengan agen akan dapat diminimalisasi.

Dalam kaitannya dengan isu penelitian ini adalah bahwa pemerintah pusat dipandang sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*, dan peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara *principal-agent*. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah versi Keynes, identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G$ merupakan pandangan kaum Keynesian akan

relevansi campur tangan Pemerintah dalam perekonomian tertutup. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan pengeluaran konsumsi, dan G merupakan Pengeluaran Pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi Pengeluaran Pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1997). Menurut Keynes untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran Pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian.

Keynes juga mengatakan bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dalam perekonomian tergantung dari besarnya pendapatan. Perbandingan antara besarnya konsumsi dengan jumlah pendapatan disebut kecenderungan mengkonsumsi ($MPC = Marginal Propensity to Consume$). Semakin besar MPC semakin besar pula pendapatan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi dan sebaliknya.

Dari pengertian di atas kecenderungan pengeluaran atau belanja seharusnya dilihat dari jumlah pendapatan. Karna komposisi pendapatan dalam struktur APBD terdapat tiga sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah, maka ketergantungan pendapatan dalam struktur APBD melalui bantuan transfer (dana perimbangan) dari pemerintah pusat kemungkinan besar akan terjadi.

2. Flypaper Effect

Istilah *Flypaper Effect* sendiri timbul dari pemikiran Okun (1930) dalam Kusumadewi dan Rahman (2007) yang menyatakan "*money sticks where it hits*". Sejauh ini, belum ada padanan kata *Flypaper Effect* dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan.

Beberapa peneliti menemukan respon Pemerintah Daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak), ketika penerimaan

daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates (1999) dalam Abdullah dan Halim (2003) menyatakan bahwa ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dari pemerintah pusat dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerahnya sendiri maka kondisi tersebut disebut dengan *Flypaper Effect*.

Fenomena *Flypaper Effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Fenomena *Flypaper Effect* dapat terjadi dalam dua versi. Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi dari pada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Kuncoro (2007).

3. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Salah satu cara untuk mengetahui kondisi kemampuan keuangan daerah diperlukan pemetaan terhadap kemampuan keuangan daerah, Bappenas (2003) menyatakan bahwa salah satu cara melihat peta kemampuan keuangan daerah adalah melalui Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan salah satu unsur dari analisis penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu analisis penerimaan. Indeks Kemampuan Keuangan yang tinggi menunjukkan kemampuan kinerja daerah dalam menggali sumber fiskal daerahnya. Secara matematik, Indeks Kemampuan Keuangan adalah rata-rata penjumlahan dari *indeks growth PAD*, *indeks share* (PAD terhadap APBD) dan *indeks elastisitas* (PAD terhadap pertumbuhan Ekonomi-PDRB).

4. Pengembangan Hipotesis

Abdullah dan Halim (2003) mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara DAU dan PAD terhadap belanja daerah, ketika tanpa menggunakan *lag*, pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat

daripada DAU, tetapi dengan digunakan *lag*, pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah justru lebih kuat daripada PAD. Hal ini menunjukkan terjadi *Flypaper Effect* dalam respon Pemerintah Daerah terhadap DAU dan PAD, namun menurut Abdullah dan Halim (2003) bahwa kabupaten/kota di Jawa dan Bali memiliki kemampuan keuangan yang berbeda dengan kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali.

Menanggapi hal tersebut Kurnia dan Ananda (2013) meneliti *flypaper effect* dengan memetakan perbedaan kemampuan keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Hasil penelitian menyebutkan bahwa Kabupaten/kota di Jawa Timur dengan IKK Tinggi tidak terjadi *Flypaper Effect* sedangkan untuk kabupaten/kota di Jawa Timur dengan IKK Sedang dan Rendah terjadi *Flypaper Effect*.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis menformulasikan hipotesis sebagai berikut:

- H 1 : Terjadi *Flypaper Effect* pada kabupaten/kota di Indonesia dengan IKK Tinggi.
- H 2 : Terjadi *Flypaper Effect* pada kabupaten/kota di Indonesia dengan IKK Sedang.
- H 3 : Terjadi *Flypaper Effect* pada kabupaten/kota di Indonesia dengan IKK Rendah.

2.3 Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Belanja Daerah

Belanja Daerah (BD) merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok

belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; belanja bantuan sosial; belanja bagi hasil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Abdullah dan Halim, 2003). Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No 32 Tahun 2004 merupakan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan selain dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan yang Sah (UU No 33 3004). PAD dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

4. Sampel dan Sumber Data

Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten/kota se-Indonesia. Data dalam penelitian ini adalah data PDRB yang bersumber dari www.BPS.go.id kemudian data PAD, DAU dan Belanja Daerah Pada APBD yang telah dipublikasikan oleh Depkeu RI dalam situs www.djpk.go.id dengan periode tahun 2010-2014.

5. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Merupakan hasil rata-rata hitung dari indeks *share*, indeks *growth* dan indeks elastisitas terhadap jumlah tahun yang akan diteliti dengan untuk mengetahui kategori kemampuan keuangan suatu daerah dalam kategori rendah, mampu dan sangat mampu. Nilai indeks *share*, *growth*

dan elastisitas, digunakan pengukuran dengan persamaan umum (Bappenas, 2003; Frediyanto, 2010 dan Adi, 2012).

Growth PAD mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. *Growth PAD* dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$\text{Growth PAD} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100$$

PAD_t = PAD pada tahun tersebut

PAD_{t-1} = PAD pada tahun sebelumnya

Share PAD Terhadap Belanja Daerah (BD). *Share* mengukur seberapa besar kontribusi PAD untuk membiayai belanja pemerintah daerah, yang mana mencerminkan potensi peningkatan kapasitas PAD dari suatu Kabupaten/kota.

$$\text{Share} = \frac{PAD}{\text{Belanja}}$$

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Belanja = Belanja Daerah

Elastisitas. Elastisitas adalah persentase perubahan PAD terhadap pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Elastisitas mencerminkan perubahan kapasitas fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian.

Pertumbuhan Ekonomi (PE). Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini memakai proxy PDRB harga konstan. Data mengenai PDRB kabupaten/kota se-Indonesia didapat dari situs BPS. Pertumbuhan ekonomi merupakan selisih PDB tahun t dengan PDB tahun sebelumnya atau $t-1$ dibagi dengan PDB tahun sebelumnya. Atau dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi (PE)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$$

Jadi *Elastisitas* diukur dengan:

$$\text{Elastisitas} = \frac{\text{Growth}}{\text{PE}}$$

Elastisitas = Elastisitas PAD terhadap pertumbuhan Ekonomi
Growth = Pertumbuhan PAD
 PE = Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Berdasarkan persamaan di atas maka persamaan IKK dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{IKK} = \frac{XG + XE + XS}{3}$$

Keterangan:

IKK = Indeks Kemampuan Keuangan
 XG = Indeks Pertumbuhan (PAD)
 XE = Indeks Elastisitas (PAD terhadap PDRB)
 XS = Indeks Share (PAD terhadap Belanja Daerah)

$$\text{Indeks } x = \frac{(\text{Nilai} \times \text{Hasil Pengukuran} - \text{Nilai} \times \text{Kondisi Minimum})}{(\text{Nilai} \times \text{Kondisi Maksimum} - \text{Nilai} \times \text{Kondisi Minimum})}$$

Tabel 2.2 *Kriteria Indeks Kemampuan Keuangan Daerah*

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK)	Klasifikasi
0,00-0,33	Rendah
0,34- 0,43	Sedang
0,44 - 1,00	Tinggi

Sumber: Bappenas (2003)

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK) diklasifikasi menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah dengan spesifikasi nilai ditunjukkan pada tabel 2.2.

Analisis Regresi Panel

Menurut Nachrowi dan Usman (2006) bahwa data panel merupakan gabungan antara data berkala (*time series*) dan data individual (*cross section*). Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu.

Terdapat tiga pendekatan model regresi data panel yaitu:

1. *Common Effect*

Metode *Common Effect* adalah metode yang hanya menggabungkan data tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2006). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan baik dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda.

2. *Effect Model (Fixed FEM)*

Model *fixed effect* pada data panel mengasumsikan bahwa koefisien *slope* konstan tetapi intersep bervariasi sepanjang unit individu. Istilah *fixed effect* berasal dari kenyataan bahwa meskipun intersep berbeda antar individu namun intersep antar waktu sama (*time invariant*), sedangkan *slope* tetap sama antar individu dan antar waktu.

3. *Random Effect Model (REM)*

Pada model *random effect* digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh model *fixed effect*. Pendekatan model *fixed effect* dengan peubah semu (*dummy*) pada data panel menimbulkan permasalahan hilangnya derajat bebas dari model.

Uji Kelayakan Model

Uji Chow

Uji *Chow* digunakan untuk memilih model *Common Effect* atau *Fixed Effect* maka dilakukan uji *Chow* melalui aplikasi *Eviews* dengan hipotesa sebagai berikut:

H0: *Common Effect Model*

H1: *Fixed Effect Model*

Jika Chi Square > 0,05 = terima H0

Jika Chi Square < 0,05 = Tolak H0

Uji Hausman

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect* yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel maka dilakukan Uji *Hausman* dengan asumsi, yaitu:

H0: model mengikuti *Random Effect*

H1: model mengikuti *Fixed Effect*.

Jika Chi Square > 0,05 = terima H0

Jika Chi Square < 0,05 = Tolak H0

Model Analisis

Penelitian ini menduga bahwa respon DAU lebih besar dari pada PAD terhadap Belanja Daerah (BD) dalam APBD Kabupaten/kota se-Indonesia berdasarkan klasifikasi IKK. Adapun model regresi data panel sebagai berikut:

$$BD_{IKK-TINGGI\ 2010-2014} = a + b_1 DAU_{IKK-TINGGI\ 2010-2014} + b_2 PAD_{IKK-TINGGI\ 2010-2014} + e, \dots \quad (1)$$

$$BD_{IKK-SEDANG\ 2010-2014} = a + b_1 DAU_{IKK-SEDANG\ 2010-2014} + b_2 PAD_{IKK-SEDANG\ 2010-2014} + e\dots \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \text{BD}_{\text{IKK-RENDAH}} 2010-2014 &= a + b_1 \text{DAU}_{\text{IKK-RENDAH}} 2010-2014 + \\ &b_2 \text{PAD}_{\text{IKK-RENDAH}} 2010-2014 + e. \end{aligned} \quad (3)$$

Keterangan:

- BD = Belanja Daerah
DAU = Dana Alokasi Umum
PAD = Pendapatan Asli Daerah
 a = konstanta
 b_1, b_2 = adalah koefisien regresi,

Analisa Regresi Data Panel dalam hal ini Penulis menggunakan bantuan Aplikasi *Eviews8*. Dan untuk menentukan apakah terjadi *Flypaper Effect*, maka efek DAU terhadap BD dibandingkan dengan efek PAD terhadap BD (Abdullah dan Halim 2003), dengan cara membandingkan koefisien regresi dan nilai *t-statistic* untuk masing-masing variabel. Apabila efek DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD, maka dapat disimpulkan terjadi *Flypaper Effect*.

2.4 Hasil Penelitian

1. Deskripsi Sampel Penelitian

Sampel akhir penelitian ini setelah dikumpulkan datanya melalui www.djpk.go.id dan www.BPS.go.id, maka daerah kabupaten/kota yang memiliki kelengkapan data dengan periode pengamatan selama 5 tahun (2010 sampai dengan 2014) sebanyak 481 daerah atau 2.405 (5 tahun pengamatan) yang terdiri dari: 189 daerah yang tidak mengalami pemekaran, 105 daerah induk pemekaran, 187 daerah otonom baru.

2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

- Deskriptif Belanja Daerah (BD) pada APBD Kabupaten dan kota se-Indonesia berdasarkan kriteria daerah

Tabel 2.3 Deskriptif Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2010 s.d 2014

	Daerah tidak Mekar (jutaan rupiah)	Daerah Induk (jutaan rupiah)	Daerah Otoritas Baru (DOB)(jutaan rupiah)
Min	410.055,25	402.268,42	308.053,30
Max	5.380.862,40	2.703.707,69	2.781.599,78
Rata-rata	1.141.012,04	903.026,11	656.653,67
Simpangan Baku	661.482,57	446.580,46	317.337,96

Sumber data diolah 2016.

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas rata-rata belanja daerah pada daerah yang tidak mengalami pemekaran adalah yang paling tinggi sebesar Rp.1.146.012.040.000,- sedangkan untuk Daerah Otonom Baru (DOB) memiliki nilai rata-rata belanja daerah paling rendah di antara tiga kriteria wilayah yaitu sebesar Rp.656.653.670.000,-.

- b. Deskriptif PAD pada Anggaran Kabupaten dan Kota se-Indonesia berdasarkan kriteria daerah

Tabel 2.4 Deskriptif PAD Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2010 s.d 2014

	Daerah Tidak Mekar (Jutaan Rupiah)	Daerah Induk (Jutaan Rupiah)	Daerah Otoritas Baru (DOB)(Jutaan Rupiah)
Min.	8.458,36	8.971,52	998,10
Max.	2.210.778,57	587.180,25	410.368,56
Rata-rata	143.353,13	57.256,82	3.4019,54
Simpangan Baku	238.990,47	75.750,50	55.686,94

Sumber: data diolah 2016.

Tabel 2.4 menunjukkan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah yang tidak mengalami pemekaran adalah yang paling tinggi sebesar Rp.143.353.130.000,- sedangkan untuk daerah yang menjadi induk pemekaran memiliki nilai rata-rata PAD Rp.57.256.82.000,- dan pada daerah Otonom Baru (DOB) memiliki rata-rata PAD sebesar Rp.3.4019.540.000,-

- c. Deskriptif DAU pada APBD kabupaten dan kota se-Indonesia berdasarkan kriteria daerah

Berdasarkan Tabel 2.5, rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) pada daerah yang tidak mengalami pemekaran adalah yang paling tinggi sebesar Rp.614.487.790.000,- sedangkan untuk daerah yang menjadi induk pemekaran memiliki nilai rata-rata DAU Rp.521.254730.000,- dan pada daerah Otonom Baru (DOB) memiliki rata-rata DAU sebesar Rp.369.823.230.000,-.

Tabel 2.5 Deskriptif DAU Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2010 s.d 2014

	Daerah tidak Mekar (jutaan rupiah)	Daerah Induk (jutaan rupiah)	Daerah Otoritas Baru (DOB)(jutaan rupiah)
Min	266484,82	224.308,96	170.040,99
Max	1.611.779,49	1.487.133,74	790.825,62
Rata-rata	614.487,79	521.254,73	369.823,23
Simpangan Baku	242.364,94	206.181,4	102.084,92

Sumber: data diolah 2016, sumber data www.djpk.go.id.

Tabel 2.6 Deskriptif Peran (*Share*) dan *Growth* Kabupaten/kota di Indonesia Periode 2010 s.d 2014

	Daerah Tidak Mekar		Daerah Induk		Daerah Otoritas Baru	
	<i>Share</i>	<i>Growth</i>	<i>Share</i>	<i>Growth</i>	<i>Share</i>	<i>Growth</i>
Min.	0,0167	0,0067	0,0174	0,028	0,0017	-0,2099
Max	0,6573	0,9114	0,2213	0,8562	0,2536	29175
Rata-rata	0,0979	0,2623	0,0550	0,2303	0,0441	0,3586
Simpangan Baku	0,0716	0,1153	0,0345	0,1531	0,0431	0,3900

Sumber: data diolah 2016.

3. Deskriptif Kemampuan Daerah Berdasarkan Peran (*Share*) dan Pertumbuhan (*Growth*)

Deskriptif data peran (*share*) yaitu peran PAD terhadap Belanja Daerah yang merupakan Rasio antara PAD dan Belanja Daerah, dan *Growth* yang merupakan pertumbuhan PAD selama tahun 2010 s.d 2014 Berdasarkan tabel 2.6 dapat diketahui bahwa peta kemampuan keuangan daerah berdasarkan peran (*share*) PAD terhadap Belanja Daerah *minimum* daerah yang tidak mengalami pemekaran sebesar 0,0167, daerah Induk Pemekaran

sebesar 0,0174 dan Daerah Otonom Baru (DOB) sebesar 0,0017 sedangkan *share maksimum* daerah yang tidak mengalami pemekaran sebesar 0,657, daerah Induk Pemekaran 0,2213 dan daerah Otonom baru sebesar 0,2536. *Rata-rata* kemampuan keuangan daerah berdasarkan *share* pada daerah yang tidak mengalami pemekaran sebesar 0,0979 daerah Induk Pemekaran 0,0550 dan DOB dengan rata-rata 0,0441. Hal ini berarti kemampuan keuangan daerah berdasarkan *share* memusat pada angka 0,0979 pada daerah yang tidak mengalami pemekaran, 0,0550 pada daerah Induk Pemekaran dan 0,0441 pada Daerah Otonom Baru.

Kemampuan keuangan berdasarkan *growth* PAD didapat statistik *minimum* daerah yang tidak mengalami pemekaran sebesar 0,0067, daerah Induk Pemekaran sebesar -0,0281 dan Daerah Otonom Baru (DOB) sebesar -0,2099 sedangkan *growth maksimum* daerah yang tidak mengalami pemekaran sebesar 0,9114, daerah Induk Pemekaran 0,8562 dan daerah Otonom baru sebesar 2,9175. *Rata-rata* kemampuan keuangan daerah berdasarkan *Growth* PAD pada daerah yang tidak mengalami pemekaran sebesar 0,2623 daerah Induk Pemekaran 0,2303 dan DOB dengan rata-rata 0,3586.

Temuan angka-angka di atas kemampuan keuangan daerah berdasarkan *Growth* PAD memusat pada angka 0,2623 pada daerah yang tidak mengalami pemekaran, 0,2303 pada daerah Induk Pemekaran dan 0,2303 pada Daerah Otonom Baru (DOB) adalah yang paling tinggi sebesar 0,3586, data tersebut menunjukkan pertumbuhan *growth* PAD pada DOB lebih baik dibanding dengan daerah lainnya. Kondisi ini menunjukkan pada daerah DOB terdapat kemampuan berkembangnya potensi lokal sehingga PAD mempunyai peluang lebih besar dalam total belanja daerah, walaupun pada DOB nilai *share* PAD terhadap Belanja Daerah (BD) masih rendah.

4. Analisis Trend Kontribusi PAD terhadap Balanja Daerah

Trend PAD terhadap Balanja Daerah pada Kabupaten/Kota IKK Tinggi. Berikut ini rata-rata trend kontribusi PAD terhadap APBD pada kabupaten/kota dengan IKK tinggi periode tahun 2010 sampai dengan 2014.

Tabel 2.7 *Trend Rata-rata Kontribusi PAD terhadap APBD pada Kabupaten/Kota di Indonesia dengan IKK Tinggi*

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Persentase (%)	7,08	7,99	8,51	9,16	9,95

Sumber: Data diolah 2016.

Tabel 2.7 memperlihatkan persentase kontribusi PAD terhadap APBD pada kabupaten/kota di Indonesia dengan IKK Tinggi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 secara rata-rata terus mengalami peningkatan hingga mencapai 10%, namun laju pertumbuhan PAD belum mampu mengakomodir kebutuhan daerah secara signifikan.

Tabel 2.8 *Trend Rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD pada Kabupaten/Kota di Indonesia dengan IKK Sedang*

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Persentase (%)	5,91	6,07	5,55	6,89	8,03

Sumber: Data di olah 2016.

Trend Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota IKK Sedang.

Berikut ini rata-rata trend kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota dengan IKK sedang periode tahun 2010 sampai dengan 2014. Tabel 2.8 menunjukkan persentase rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD pada kabupaten/kota di Indonesia dengan IKK sedang mengalami *fluktuasi*, persentase kontribusi terendah yaitu terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 5,55% dan tertinggi yaitu pada tahun 2014 yang mencapai 8%.

Trend Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota IKK Rendah

Berikut ini rata-rata trend kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota dengan IKK rendah periode tahun 2010 sampai dengan 2014.

Tabel 2.9 *Trend Rata-rata Kontribusi PAD terhadap APBD pada Kabupaten/Kota di Indonesia dengan IKK Rendah*

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Persentase(%)	5,05	4,54	4,21	4,38	4,87

Sumber: Data diolah 2016.

Tabel 2.9 menunjukkan persentase rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD pada kabupaten/kota di Indonesia dengan IKK Rendah mengalami *fluktuasi*, persentase kontribusi terendah yaitu terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 4,21% dan tertinggi yaitu 5,05% yaitu pada tahun 2010.

5. Pemetaan Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota se-Indonesia Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Tabel 2.10 *Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2010 s.d 2014*

	Kategori IKK			Presentasi Kategori IKK		
	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah
Min.	94	64	31	51,37	42,38	21,09
Max.	38	31	36	20,77	20,53	24,49
Rata-rata	51	56	80	27,09	37,09	54,42
Simbapangan Baku	183	151	147	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data diolah 2016.

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan rata-rata Indeks *Share* (XS) Indeks *Growth* (XG) yang merupakan Indeks pertumbuhan PAD dan Indeks *Elastisits* (XE) yang merupakan rasio antara *Growth* dan Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB) seperti yang dijelaskan pada Bab III. Dari pengolahan data didapat klasifikasi Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Kabupaten/Kota se-Indonesia pada Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel di atas menunjukkan daerah yang memiliki klasifikasi Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) tinggi adalah sebanyak 94 daerah pada wilayah yang tidak mengalami pemekaran, 38 daerah pada daerah Induk Pemekaran dan 51 daerah pada Daerah DOB. Kemudian daerah yang

memiliki klasifikasi Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) sedang adalah sebanyak 64 (42,38%) daerah pada wilayah yang tidak mengalami pemekaran, 31 (20,53%) daerah pada daerah Induk Pemekaran dan 56 (37,09%).

Sedangkan daerah yang memiliki Indeks Kemampuan Klasifikasi Keuangan (IKK) Rendah adalah sebanyak 31 daerah pada wilayah yang tidak mengalami pemekaran, 36 daerah pada daerah Induk Pemekaran dan 80 daerah pada Daerah Otonom Baru (DOB), data ini menunjukkan pada daerah Daerah Otonom Baru (DOB) masih banyak daerah yang memiliki Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Rendah.

6. Analisis Pemilihan Model

Tabel 2.11 Hasil Chi-Squared Hasil Uji Chow

Klasifikasi Daerah	Hasil Pengujian		Keputusan
IKK Tinggi	Prob. Cross-section Chi-Square	0,000	Model Fixed effect
IKK Sedang	Prob. Cross-section Chi-Square	0,000	Model Fixed effect
IKK Rendah	Prob. Cross-section Chi-Square	0,000	Model Fixed effect

Sumber: Data diolah 2016.

Pemilihan Model *Common Effect* dan *Fixed Effect* (Uji Chow)

Dari hasil analisis *redundant fixed test-likelihood ratio* didapat Hasil Chi squared pada setiap kriteria daerah pengamatan adalah seperti tabel 2.11. Dari Tabel 2.11 di atas terlihat bahwa dari hasil pengujian regresi didapat nilai *R-squared* model *fixed effect* lebih tinggi dari *common effect* dan dengan Uji Chow didapat *chi square* 0,000 (Jika Chi Square < 0,05 = Tolak H₀) sehingga dapat di tentukan model *Fixed effect* lebih tepat.

7. Pemilihan *Fixed Effect* vs *Random Effect* (Uji Hausman Specification Test)

Dari hasil analisis Uji Hausman Test di dapat Hasil Chi squared pada setiap kriteria daerah pengamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Hasil Chi-Squared Hasil Uji Hauman

Klasifikasi Daerah	Hasil Pengujian		Keputusan
IKK Tinggi	Prob. Cross-section Chi-Square	0,000	Model Fixed effect
IKK Sedang	Prob. Cross-section Chi-Square	0,000	Model Fixed effect
IKK Rendah	Prob. Cross-section Chi-Square	0,000	Model Fixed effect

Sumber: Data diolah 2016.

Pada Tabel 2.12 dapat dilihat bahwa nilai *probability* pada test *cross-section random effect* memperlihatkan angka 0,000 baik pada tes klasifikasi IKK tinggi maupun klasifikasi IKK sedang dan rendah, nilai tersebut menunjukkan angka *signifikan* dengan tingkat *signifikansi* 95% ($\alpha = 5\%$) dan menggunakan distribusi *Chi-Square* (Gujarati: 2003). Sehingga keputusan yang diambil pada pengujian *Hausman tes* ini yaitu menolak H_0 . Jadi pengujian dalam penelitian ini menggunakan *Fixed Effect* dalam pengolahan regresi data panel.

8. Pengujian Asumsi Klasik

Data panel adalah regresi yang menggabungkan data *time series* dan data *cross section* (Widarjono, 2009). Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan estimasi data panel. Pertama, meningkatkan jumlah obeservasi (sampel), dan kedua, memperoleh variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan variasi menurut waktu (Kuncoro, 2012). Menurut Gujarati (2012) data panel sedikit terjadi kolinearitas antar variabel sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi multikolinearitas. Berdasarkan uraian tersebut asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian adalah uji *autokorelasi* dan uji *heterokedastisitas*.

Otokorelasi

Pada *output* (terlampir) terlihat bahwa DW-stat bernilai 1,459 pada daerah klasifikasi IKK Tinggi, 1,433 pada daerah klasifikasi IKK Sedang dan Rendah di mana keduanya tidak menunjukkan berada pada kisaran angka 2 ($1,5 < DW\text{-Stat} < 2,5$) yang menurut (Winarno, 2011: 5,28) mengidentifikasi pada model tersebut mempunyai masalah *Otokorelasi*. Oleh karena itu penulis melakukan perbaikan untuk mengatasi masalah

tersebut dengan cara kebentuk model *cross-section weights* (Winarno, 2011), hasil yang didapat (selengkapnya pada lampiran) DW-Stat (*Weighted*) pada daerah dengan IKK tinggi menjadi 1,97 dan 2,02 untuk daerah dengan IKK sedang sedangkan untuk daerah IKK rendah menjadi 2,11 (hasil pengujian terlampir), nilai DW-Stat tersebut menunjukkan masalah *Otokorelasi* dapat teratasi.

Heterokedastisitas

Tabel 2.13 Perbandingan Model *Fixed effect* (FE)

Panel A: Perbandingan Model FE pada daerah IKK Tinggi		
Parameter	FE <i>unweighted</i>	FE <i>weighted</i>
R-squared	0.981840	0.995747
Prob(F-statistic)	0.000000	0.000000
Panel B: Perbandingan Model FE pada daerah IKK Sedang		
R-squared	0.984686	0.992224
Prob(F-statistic)	0.000000	0.000000
Panel C: Perbandingan Model FE pada daerah IKK Rendah		
R-squared	0.94859	0.985603
Prob(F-statistic)	0.000000	0.000000

Sumber: Data diolah 2016.

Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data *cross section*. Karena regresi data panel memiliki karakteristik tersebut, maka ada kemungkinan terjadi *heteroskedastisitas*. Dari tiga model regresi data panel *Fixed effect* (FE) yang memungkinkan terjadinya *heteroskedastisitas*.

Untuk mengetahui apakah model *Fixed effect* (FE) terjadi *heteroskedastisitas* atau tidak, dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil antara model *Fixed effect* (FE) tanpa pembobotan (*unweighted*) dan model *Fixed effect* (FE) dengan pembobotan (*weighted*). Hasil perbandingan kedua model FE ditunjukkan pada pada Tabel 2.13.

Berdasarkan 2 (dua) parameter tabel 4.15 di atas pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan, dan pada R-squared model FE *weighted* lebih besar (lebih baik) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model *Fixed effect* (FE).

2.5 Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis 1

Hasil Regresi data panel pada klasifikasi IKK Tinggi adalah sebagai berikut.

Dari tabel 2.14 terlihat F statistik didapat 215,2245 dengan signifikansi 0,000 hal ini menunjukkan DAU dan PAD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD), R-squared = 0,981 menunjukkan varian DAU dan PAD mampu menjelaskan Belanja Daerah (BD) sebesar 98,1%, dan dari nilai *t-statistic* untuk keduanya adalah 40,350 dan 22,775 (untuk DAU lebih besar dari PAD), signifikansi menunjukkan bahwa pengaruh DAU yang lebih tinggi daripada PAD.

Tabel 2.14 Hasil Regresi DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Indonesia dengan IKK Tinggi

Dependent Variable: BD?				
Method: Pooled Least Squares				
Cross-sections included: 174				
Total pool (balanced) observations: 870				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	38673.86	18547.96	2.085073	0.0374
DAU?	1.595819	0.039549	40.35014	0.0000
PAD?	1.057389	0.046427	22.77542	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.981907	Mean dependent var	1007255.	
Adjusted R-squared	0.977345	S.D. dependent var	739227.3	
S.E. of regression	111264.9	Akaike info criterion	262.5579	
Sum squared resid	8.59E+12	Schwarz criterion	272.2045	
Log likelihood	-11245.27	Hannan-Quinn criter.	26.62490	
F-statistic	215.2245	Durbin-Watson stat	1.459187	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil penelitian, 2016 (diolah).

Artinya, kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada jumlah PAD, atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU lebih tinggi daripada respon belanja daerah terhadap penerimaan PAD, hal tersebut dapat dilihat juga dengan nilai koefisien keduanya yaitu 1.595 untuk DAU dan 1.057 untuk PAD artinya setiap bertambahnya 1 milyar Rupiah DAU maka Belanja Daerah (BD) akan meningkat sebesar 1,595 Milyar rupiah, sedangkan dengan bertambahnya 1 milyar rupiah PAD, Belanja Daerah (BD) akan meningkat sebesar 1,057 milyar rupiah.

Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan terjadi *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Indonesia dengan IKK Tinggi **diterima**, Hal ini menunjukkan Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah (BD) lebih besar daripada pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah (BD). Hasil ini tidak konsisten dengan temuan Kurnia dan Ananda (2013) pada Jurnal Ekonomi Unibraw yang menyatakan bahwa **tidak terjadi flypaper effect** pada daerah dengan klasifikasi Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Tinggi pada Provinsi Jawa Timur, namun temuan ini konsisten dengan temuan-temuan sebelumnya, seperti Deller *et al* (2002), Legrenzi & Milas (2001), dan Zampelli (1986), Abdul Halim dan Syukri Abrullah (2003) Mutiara Maimunah (2006).

Tabel 2.15 memperlihatkan bahwa F statistik didapat 254.6941 dengan signifikansi 0,000 hal ini menunjukkan DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD), $R\text{-squared} = 0,984$ menunjukkan varian DAU dan PAD mampu menjelaskan Belanja Daerah (BD) sebesar 98,4%, sedangkan nilai *t-statistic* untuk keduanya adalah 52,286 dan 21,565 (untuk DAU lebih besar dari PAD), signifikansi menunjukkan bahwa pengaruh DAU yang lebih tinggi daripada PAD. Artinya, kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada jumlah PAD, atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU lebih tinggi dibanding dengan respon belanja daerah terhadap penerimaan PAD.

Uji Hipotesis 2

Hasil Regresi data panel pada klasifikasi IKK Sedang dan Rendah adalah sebagai berikut.

Koefisien regresi menunjukkan nilai 1.446 untuk DAU dan 1.288 PAD hal tersebut menunjukkan dengan bertambahnya 1 milyar rupiah DAU maka Belanja Daerah (BD) akan meningkat sebesar 1,446 milyar rupiah, sedangkan dengan bertambahnya 1 milyar rupiah PAD, Belanja Daerah (BD) akan meningkat sebesar 1,288 milyar rupiah.

Tabel 2.15 Hasil Regresi DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Indonesia dengan IKK Sedang

Dependent ariable: BD?				
Method: Pooled Least Squares				
Cross-sections included: 147				
Total pool (balanced) observations: 735				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	37633.53	13672.90	2.752417	0.0061
DAU?	1.446465	0.028951	49.96212	0.0000
PAD?	1.288484	0.053302	24.17345	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.984692	Mean dependent var	915300.1	
Adjusted R-squared	0.980826	S.D. dependent var	521901.9	
S.E. of regression	72268.14	Akaike info criterion	25.39305	
Sum squared resid	3.06E+12	Schwarz criterion	26.32554	
Log likelihood	-9182.944	Hannan-Quinn criter.	25.75269	
F-statistic	254.6941	Durbin-Watson stat	1.736139	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil penelitian, 2016 (diolah).

Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan terdapat *flypaper effect* pada kabupaten/kota dengan IKK Sedang di Indonesia dengan **diterima** (H2 diterima), artinya pengaruh atau respon DAU terhadap Belanja Daerah (BD) lebih tinggi dari pada pengaruh atau respon PAD terhadap Belanja Daerah (BD). Hasil temuan konsisten dengan Kurnia dan Ananda (2013) yang menyatakan bahwa terjadi *flypaper effect* pada daerah dengan klasifikasi Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Sedang pada Provinsi Jawa Timur.

Uji Hipotesis 3

Hasil Regresi data panel pada klasifikasi IKK Sedang dan Rendah adalah seperti Tabel 2.16.

Tabel 2.16 Hasil Regresi DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah (BD) pada Kabupaten/Kota di Indonesia dengan IKK Rendah

Dependent Variable: BD?				
Method: Pooled Least Squares				
Cross-sections included: 141				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	52042.05	20544.82	2.533099	0.0116
DAU?	2.200581	0.215233	30.51839	0.0000
PAD?	1.466326	0.048047	10.22420	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.949193	Mean dependent var	786999.7	
Adjusted R-squared	0.936356	S.D. dependent var	462956.9	
S.E. of regression	116793.7	Akaike info criterion	26.35318	
Sum squared resid	7.67E+12	Schwarz criterion	27.27775	
Log likelihood	-9146.497	Hannan-Quinn criter.	26.71047	
F-statistic	73.94029	Durbin-Watson stat	1.289797	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil penelitian, 2016 (diolah).

Tabel 2.16 menunjukkan ketika DAU dan PAD secara serentak diregresi dengan Belanja Daerah (BD) F statistik didapat 73.940029 dengan signifikansi 0,000 hal ini menunjukkan DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD), *R-squared* = 0,949 (94,9%) menunjukkan varian DAU dan PAD mampu menjelaskan Belanja Daerah (BD) sebesar 94,9% dan dari nilai *t-statistic* untuk keduanya adalah 30,51 dan 10,22 (untuk DAU lebih besar dari PAD), signifikansi menunjukkan bahwa pengaruh DAU yang lebih tinggi daripada PAD. Artinya, kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada jumlah PAD, atau respon belanja daerah terhadap penerimaan DAU lebih tinggi dibanding dengan respon belanja daerah terhadap penerimaan PAD, dan

koefisien regresi menunjukkan nilai 1.446 untuk DAU dan 1.288 PAD hal tersebut menunjukkan dengan bertambahnya 1 milyar rupiah DAU maka Belanja Daerah (BD) akan meningkat sebesar 1,446 milyar rupiah, sedangkan dengan bertambahnya 1 milyar rupiah PAD, Belanja Daerah (BD) akan meningkat sebesar 1,288 milyar rupiah.

Tabel 2.17 Hasil Regresi DAU dan PAD terhadap BD Tanpa Belanja Pegawai

Keterangan	Daerah IKK Tinggi	Daerah IKK Sedang	Daerah IKK Rendah
Constanta	180610	169994	119.362
Coefficient			
DAU	1.113077*	1.050229*	3.059117**
PAD	1.905969*	1.901292*	1.265960**
t-Statistic			
DAU	15.48820*	12.42617*	1690007**
PAD	18.17796*	22.18149*	1230131**
F-Statistik	4.225.728	7.066701	3.725349
R-squared	0,914626	0,947079	0,904761
Adjusted R-squared	0,892981	0,933677	0,880652

* Tidak terjadi *flypaper effect*

** Terjadi *flypaper effect*

Sumber: Data diolah 2016.

Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan terdapat *flypaper effect* pada kabupaten/kota dengan IKK rendah di Indonesia **diterima** (H3 diterima), artinya pengaruh atau respon DAU terhadap Belanja Daerah (BD) lebih tinggi dari pada pengaruh atau respon PAD terhadap Belanja Daerah (BD). Pengujian hipotesis di atas hanya melihat Belanja Daerah (BD) dan DAU secara keseluruhan, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui sisi lain dari pengaruh PAD dan DAU dengan mengurangi jumlah DAU dan BD sebesar belanja pegawai, karena belanja pegawai sebagian besar merupakan gaji pegawai yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Tabel 2.17 memperlihatkan bahwa setelah BD dan DAU dikurangi Belanja Pegawai, maka didapat pengaruh atau respon DAU lebih tinggi dari pada PAD terhadap BD hanya terjadi pada daerah dengan IKK rendah saja. Hal ini menunjukkan *Flypaper Effect* tidak terjadi di seluruh kabupaten

/kota di Indonesia melainkan hanya terjadi pada kabupaten/ kota dengan IKK yang Rendah.

2.6 Pembahasan

Penelitian ini melihat sumber pendapatan daerah manakah yang lebih memengaruhi besaran belanja daerah, apakah penerimaan transfer dari pemerintah pusat berupa *unconditional grants (DAU)*, menimbulkan stimulasi belanja yang berbeda dengan stimulasi yang muncul dari PAD atau terjadi fenomena *flypaper effect*.

Penentuan terjadinya *flypaper effect* dapat dilakukan dengan membandingkan *t-statistic* dari variabel bebas yaitu dana transfer (DAU) dengan PAD, di mana nilai jika *t-statistic* DAU lebih tinggi dibanding dengan PAD dengan probabilitas $\alpha < 5\%$ maka terjadi *flypaper effect* (Abdullah dan Halim 2003), dan nilai koefisien *Unconditional Grants (DAU)* yang lebih besar dari nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keduanya signifikan. Sebelum melakukan analisis regresi untuk melihat *flypaper effect* peneliti terlebih dahulu memetakan daerah menurut Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dengan acuan Bappenas (2003), tujuannya untuk melihat perbedaan terjadinya *flypaper effect* di antara kriteria daerah menurut Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dimaksud. Dari hasil perhitungan didapat pemetaan daerah dengan kategori IKK seperti pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Jumlah Daerah Berdasarkan Kategori IKK

No	Kategori IKK	Jumlah Daerah
01.00	IKK Tinggi	183
02.00	IKK Sedang	151
03.00	IKK Rendah	147

Sumber: Data diolah 2016.

Tabel 2.18 menunjukkan jumlah daerah berdasarkan kategori IKK. Hasil analisis regresi didapat nilai *t-statistic* maupun nilai *coefficient* dari uji hipotesis satu, dua, dan tiga menunjukkan nilai yang lebih besar untuk DAU

dibanding dengan PAD, baik di daerah dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang tinggi, sedang maupun rendah. Tabel 2.19 menunjukkan bahwa *flypaper effect* terjadi di seluruh kabupaten/kota dengan IKK tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 2.19 Hasil Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Hipotesis	Coefficient	t-statistic	Simpulan
H1	DAU: 1,595	DAU: 40,350	Ha terdukung
	PAD: 1,057	PAD: 22,775	
H2	DAU: 1,446	DAU: 49,962	Ha terdukung
	PAD: 1,288	PAD: 24,173	
H3	DAU: 2,200	DAU: 39,518	Ha terdukung
	PAD: 1,466	PAD: 102,24	

Sumber: Data diolah 2006

Hal tersebut terjadi dimungkinkan karena Pemerintah pusat terus mensupport dana transfer berupa dana perimbangan kepada daerah yang merupakan konsekuensi atas otonomi daerah agar tidak menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, akan tetapi daerah merespon lebih akan kebutuhan dana transfer tersebut. Daerah terus berupaya mempertahankan besaran dana tersebut bahkan menaikkan kebutuhan akan dana transfer, agar di tahun berikutnya dana transfer yang diperoleh akan semakin besar, kondisi ini terlihat dari trend transfer pemerintah pusat yang selalu naik dari tahun ke tahun (Tabel 2.1) dan porsi terbesar dana transfer pemerintah pusat adalah DAU (Gambar 2.1).

Nilai tersebut menunjukkan pemerintah daerah kurang termotivasi dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerahnya, seharusnya dengan adanya dana transfer, pemerintah daerah akan terbantu dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat memicu meningkatkan pajak daerah, dan dengan meningkatnya pajak daerah, PAD akan semakin naik dari tahun ke tahun. Apabila hal tersebut dapat dilakukan pemerintah daerah dengan baik, maka kemampuan keuangan daerah semakin lama semakin baik, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Karena penelitian ini salah satu variabel independennya menggunakan DAU yang merupakan *unconditional grant*, menurut undang-undang di dalamnya terdapat gaji pegawai dan merupakan *discretion* pemerintah pusat, maka peneliti mencoba mengeluarkan belanja pegawai tersebut. Setelah dilakukan pengujian dengan mengeluarkan belanja pegawai, hasil pengujian menunjukkan bahwa *flypaper Effect* tidak terjadi pada kabupaten/kota dengan IKK yang tinggi dan sedang, namun *flypaper Effect* tetap terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia IKK rendah. Sebagaimana hasil penelitian, bahwa daerah dengan IKK rendah paling banyak ditemukan pada Daerah Otonom Baru (DOB) yang mencapai 54,42%. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan penantauan dan monitoring terhadap pertumbuhan ekonomi DOB dimaksud dan kebijakan-kebijakan daerah dimaksud dalam memperlakukan DAU. Karena pertumbuhan ekonomi akan memicu pertumbuhan pajak daerah, yang akan meningkatkan PAD, sehingga diharapkan dengan meningkatnya PAD pemerintah pusat dapat mengurangi DAU dan lebih memaksimalkan dana transfer ke sektor pembangunan.

2.7 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Studi ini menganalisis pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran atau belanja daerah di Indonesia dengan menggunakan sampel kabupaten dan kota di Indonesia Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Pendapatan daerah dalam penelitian ini diproksikan oleh DAU dan PAD, sedangkan Belanja Daerah adalah jumlah total pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran yang terdapat dalam Laporan APBD. Penelitian ini menggunakan data panel periode tahun 2010 s.d 2015 (5 tahun anggaran). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Flypaper effect* terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia dengan dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) tinggi;
2. *Flypaper effect* terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia dengan dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) sedang;

3. *Flypaper effect* terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia dengan dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) rendah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi berikutnya, di antaranya *pertama* belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung terdapat Tunjangan Tambahan Beban Kerja Pejabat Eselon di daerah, di mana setiap daerah memiliki besaran yang berbeda-beda sesuai kebijakan kepala daerah masing-masing. Sehingga akan lebih baik jika besaran belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung yang dikeluarkan pada penelitian hanya belanja gaji pegawai saja yang terdiri dari 10 unsur sesuai dengan peraturan menteri keuangan, karena merupakan kebijakan langsung dari pemerintah pusat. Tujuannya untuk mengetahui daerah mana yang menggunakan DAU hanya ke belanja operasional saja dan mengetahui daerah mana yang lebih mampu mengembangkan potensi penerimaan daerahnya, sehingga dapat mengurangi *flypaper effect*. *Kedua* data yang digunakan merupakan data yang bersumber dari www.djpk.go.id yang masih terdapat angka sementara sehingga terdapat data yang tidak normal pada beberapa daerah yang menyebabkan daerah tersebut dikeluarkan dari data penelitian, sebaiknya data yang digunakan data yang telah *fix* berdasarkan data APBD yang telah diperiksa oleh BPK RI.

Saran

Pemerintah pusat sebaiknya terus memantau dan memonitoring perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB), karena dari hasil pemetaan melalui Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), bahwa IKK rendah paling banyak terjadi pada Daerah Otonom Baru (DOB), dan hasil penelitian menunjukkan daerah tersebut terjadi *flypaper effect*, meskipun peneliti telah mengeluarkan belanja pegawai.

2.8 Daftar Pustaka

- Abdullah, Sukry dan Abdul Halim, 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* Vol. XIII/25, No. 2: 1140-1159.
- Adi, P.H. 2012. Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa - Bali), *Jurnal Kritis Studi Pembangunan Interdisiplin* Vol. XXI No. 1:1-19.
- BPS 2014 *BPS.go.id*.
- BAPPENAS, 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- DJPK, *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. (www.djpk.depkeu.go.id).
- Deller, Steven, Craig Maher, & Victor Lledo. 2002. Wisconsin Local Government, State Shared Revenues and the Illusive Flypaper Effect. University of Wisconsin-Madison, *working paper*.
- Gujarati, Damodar, N., (2003), *Basic Econometric*, Mc-Graw Hill, New York.
- Haryo Kuncoro, 2004. "Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 9 No. 1, Hal: 47-63
- Kurnia, Dedy Eka dan Ananda Fajri (2013) Analisis Flypaper Effect berdasarkan pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Unibratw* Vol. 1 No.2 Hlm. 1.
- Koespramoedyo, Dedy. 2005. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.

- Lestari L F Simanjuntak, Ahmad Subeki, Ika Sesti Ferina, Hasni Yusriant. 2013. Analysis of Flypaper effect in general allocation fund and regional original income to regional expenditure of district and cities in south sumatra (*The 14th FourA Annual Conference 2013, Penang, Malaysia, October 28-30*).
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nachrowi, Djalal Nachrowi, dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga penerbit FE-UI, Jakarta.
- Oates, Wallace E. 1999. An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature* Vol. XXXVII 1120-1149.
- Pramuka, Bambang Agus. 2010. *Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa*. *Jurnal Ekonomi* Vol 11. No.1 Hlm 1-12.
- Romadhona Ria Aulia. 2013. *Analisis flypaper effect pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Tesis MIA Unila.
- R. Aji Shochrul, dkk, 2011. *Cara Cerdas Mengusai Evictes*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sagbas, Isa dan Saruc, Naci Tolga. 2004. Intergovernmental Transfers and The Flypaper Effect In Turkey. *JEL classification: H71, H72, H77*.
- Sugiarto; Dergibson Siagian; Lasmono Tri Sunaryanto; Deny S. Oetomo. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Sidik, Machfud, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak, & Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum - Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Utama, Sampurna Budi (2013) "Apakah Flypaper Effect terjadi di Indonesia" *Buletin Edukasi Keuangan* edisi 17/2013 Departemen Keuangan RI.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pemerintahan Daerah.*
Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.*
Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah.* Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.*
Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* Sekretariat Negara Republik
Indonesia.
- Wibisono, Yusuf, 2005. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional:
Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000. *Jurnal Ekonomi
dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 02, hal.91-120
- Widarjono (2005). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis.*
Yogyakarta. Penerbit EKONISIA
- Winarno, Wing Wahyu., 2011, Edisi 3. *Analisis Ekonometrika dan Statistika
dengan Eviews*, STIM YKPN: Yogyakarta.